

PROFETISME KAUM INTELEKTUAL DI TENGAH KRITISISME REFORMASI POLITIK

Maksimilianus Jemali

Program Studi PGSD STKIP St. Paulus, Jl. Ahmad Yani, No.10, Ruteng 86508
e-mail: lianjemali@yahoo.co.id

Abstract: Intellectuals Profetism in the Middle Criticism Political Reform. Politics is related to bargain-ing and interest. Politics triggers more people to intensively engage in it. Not only is the intensity of participation revealed in the intellectual realm (analysis and discussion) but in the context of praxis as well. In a certain extent, there is a correlation of give –take concept between the academic and the political praxis. The basis of analysis and the context of political praxis should be intensively addressed, so the existence of politics and its meaning brings a positive impact for the people. Ideally, politics has good intentions.

Keywords: profetism, intellectual, reform, politics

Abstrak: Profetisme Kaum Intelektual di Tengah Kritisisme Reformasi Politik. Politik merupakan ruang penuh tawaran dan orientasi. Politik merangsang banyak orang untuk turut berpartisipasi secara intensif di dalamnya. Intensitas partisipasi tidak hanya terwujud dalam ranah intelektual (analisis-analisis dan diskusi) tetapi juga dalam konteks praksis. Dalam tataran tertentu, ada korelasi yang saling memberi dan menerima antara yang akademik dan yang dijalankan dalam praksis politik. Landasan analisis dan konteks praksis politik perlu diberi ruang yang intensif dan adekuat sehingga keberadaan politik dan maknanya membawa dampak yang positif bagi rakyat. Ideal intensi politik adalah kebaikan.

Kata Kunci: profetisme, intelektual, reformasi, politik

PENDAHULUAN

Aneka fenomena yang berkembang akhir-akhir ini telah menampilkan beberapa perubahan yang cukup signifikan terutama dalam konstelasi politik kita. Salah satunya adalah pola keterlibatan semua orang dalam berpolitik, baik dalam ranah praksis maupun teoritis-kritis. Politik dan eksistensinya bukan lagi menjadi sebuah terminologi yang alienatif dan terpenjara dalam pribadi-pribadi tertentu. Politik tidak lagi diposisikan sebagai wilayah yang sakral yang hanya dihuni oleh para politisi saja tetapi juga oleh kita semua yang memiliki *specific attention* terhadap kiprah politik itu sendiri, kendatipun dalam berbagai konteks yang kompleks. Kita memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam membahas atau menyelesaikan masalah seputar kiprah politik. Di pihak lain, terimplisit juga suatu tujuan yang baik yaitu adanya usaha

untuk mengembangkan suatu atmosfer perpolitikan yang lebih berbingkai humanis dan berwajah demo-kritis.

Kebebasan dalam berpolitik ternyata tidak hanya menimbulkan aspek positif tetapi juga menimbulkan ambiguitas terutama dalam menjalankan roda reformasi. Ambiguitas itu muncul karena banyak politisi yang dengan sengaja membelokkan intensi luhur politik (kebaikan bersama) untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ketika kepentingan pribadi membenamkan kepentingan bersama, disana muncul konflik baik secara vertikal maupun secara horizontal. Aneka konflik yang tidak diselesaikan dengan baik akan melahirkan konflik baru yang berujung pada tindakan kekerasan. Dan, politik yang dipersandingkan dengan kekerasan akan menelurkan kehancuran dan ketidakjelasan.

Dalam semangat heroisme dan profetisme era reformasi, penulis akan memaparkan berbagai

fenomena yang terjadi akhir-akhir ini seraya mengedepankan signifikansi profetisme kaum intelektual di tengah kritisisme reformasi praksis politik. Reformasi tidak bisa diagungkan serentak ditelantarkan begitu saja. Reformasi perlu dikritisi supaya bisa berkiblat dalam aras sejatinya. Dalam konteks ini, kaum intelektual (akademisi) diberi peluang untuk mempertaruhkan dedikasi dan kontribusinya bagi rakyat. Tulisan ini kiranya mampu mendongkrak horizon berpikir kita untuk terus mencari praksis politik yang benar dan juga semakin kritis dalam mencerapi berbagai fenomena politik yang terjadi.

PARADIGMA POLITIK INDONESIA

Disorientasi Visi Reformasi Politik

Reformasi yang sedang bergulir ternyata masih melahirkan aneka pertanyaan seputar masa depan perjuangan politik. Sepertinya reformasi hanya menjadi sebuah konsep saja yang tidak memiliki daya gigit yang lebih tajam. Reformasi bukanya menghadirkan perubahan atau pembaharuan tetapi malah menciptakan konflik-konflik. Visi reformasi direkayasa sedemikian rupa dan menjadi kabur akibat ulah elite politik yang mengabaikan hakikat luhur dari reformasi itu sendiri. Bahkan visi itu dijadikan tameng untuk menutupi kebijakan-kebijakan yang tidak reformatif atau aktivitas yang cenderung destruktif. Reformasi yang sebenarnya menjadi fundamen pembaruan *the better future*, akhirnya dijungkirbalikan oleh operasionalisasi kekuasaan yang pongah. Kita bisa menilik kenyataan, betapa banyak penguasa yang masih berkeliaran dalam konstelasi politik kita-masih terobsesi untuk mempermainkan kekuasaan yang telah dimandatkan serta meletakkan kekuasaan di atas segalanya demi meraih privilese (bukan prestasi), popularitas uang, jabatan seperti akibat lanjutan seperti racun kuasa (*power poison*), mengeram dalam status quo atau suka berbohong kepada rakyat.

Dalam konteks horizon kemasyarakatan juga sering terjadi aktus-aktus destruktif, seperti: kerusuhan antara kelompok masyarakat, melemahnya kompetensi perangkat-perangkat sipil, terorisme yang merobohkan tembok-tembok humanitas, meluapnya gerakan politisasi agama dan agamaisasi politik, main hakim sendiri, resistensi atau ketidakpatuhan sosial (*social disobedience*) serta gerakan separatis yang mengancam keamanan integritas nasional.

Sejalan dengan mengglobalnya atmosfer reformasi, politik di negeri kita terus menimbulkan

kontradiksi-kontradiksi. Politik tidak lagi berfungsi sebagai instrumen yang menghadirkan kebaikan bersama di tengah masyarakat tetapi justru membawa kegelisahan-kegelisahan baru. Politik yang terlibat (merakyat) hanyalah sebuah utopia yang menyelubung suatu mode politik yang destruktif. Rakyat hanya mendapat jatah pembungkaman atau dibungkamkam. Upaya privatisasi kekuasaan dicapai dalam sebuah struktur birokrasi yang sentralistik, feodalistis dan totalitarian. Politik menjadi ladang potensial untuk mempermainkan rakyat yang nota bene sederhana persepsi politiknya.

Minimalisasi Politik

Iklim politik kita selalu ditandai dengan sikap apatisisme, miskinnya inovasi politik serta minimnya proses aktualisasi demokrasi. Para elite politik terlalu pandai melakukan improvisasi politik yang tidak kondusif terhadap demokratisasi. Mereka tidak mampu mencetak “resume” yang komperhensif, integral dan produktif terhadap “demokrasi” yang sedang menggeliat di tengah masyarakat (Regus, 2004:38). Dengan munculnya para koruptor, popularitas figur politik dan minimnya kapasitas intelektual dari seorang politisi menjadikan wahana politik kita diwarnai berbagai tindakan manipulatif. Politik kehilangan pesona konstruktifnya.

Apa yang juga menggeliat dalam konstelasi politik kita adalah menguatnya minimalisme politik (*political minimalism*) seperti yang dideskripsikan oleh sosiolog Yaraf Amir Piliang, dalam salah satu artikelnya (Piliang, 2004:4). Menurutnya apa yang sedang berlangsung adalah proses minimalisasi politik yaitu pendangkalan, reduksionisme, dan banalitas politik dengan beberapa aspeknya: *pertama*, minimalisasi tujuan politik, yaitu saat wacana politik dijalankan atas dasar tujuan yang amat diminimalisasikan, yaitu politik sebagai alat untuk mencari kekuasaan *an sich* dengan melegalkan berbagai cara. *Kedua* minimalisasi kompetensi politik, rendahnya standar-standar kualitas aktor-aktor politik disebabkan minimnya *software* politik (intelektualitas dan moralitas yang berkualitas) dan *hardware* politik (media politik, perangkat) yang mengarah pada manipulasi dan politik vulgar. *Ketiga*, minimalisasi realitas politik yang ditutupinya ketiadaan realitas politik, yaitu ketidakmampuan (*unability*) menciptakan realitas politik dan ditutupinya ketiadaan realitas politik oleh kemasan citra politik sebagai cara memanipulasi pikiran dan kesadaran masyarakat. *Keempat*, minimalisasi aktor politik yaitu keterlibatan

tokoh-tokoh populer yang memiliki kecakapan yang minimal dalam hal pendidikan politik dan sekaligus tidak tahu tentang kinerja politik. *Kelima*, minimalisasi kebenaran politik yaitu ruang-ruang rasionalitas politik diselewengkan ke arah mitologisasi politik (*mythologisation of politics*) dengan fantasi politik yang irasional, imajinasi dangkal dan semu patron ideal masa lalu seraya mengasingkan tuntutan perubahan dalam masyarakat. *Keenam*, minimalisasi moralitas politik, ketika ruang politik menjelma menjadi ironi politik memparodi diri sendiri (*self parodying irony*) yang cukup memprihatinkan.

Percaturan dalam konstelasi politik kita semakin parah ketika kedudukan rakyat yang strategis dan signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kurang diperhatikan. Rakyat justru menjadi objek yang selalu disuapi dengan janji-janji palsu. Rakyat menjadi batu loncatan untuk mencapai kursi-kursi kekuasaan yang mereduksi semangat dan daya juang. Pereduksian semangat kebangsaan, kepentingan umum dan demokrasi ke dalam kantung-kantung kepentingan pribadi dan golongan yang sempit, merefleksikan gagalnya pencapaian-pencapaian maksimal dalam bidang politik. Dan betapa berhasilnya kekuatan lama dalam memanfaatkan kesemrawutan mentalitas politik tokoh-tokoh reformasi (Regus, 2004:91). Di sini muncul skeptisisme terhadap konsistensi atau komitmen untuk menjalankan format politik yang baik, benar dan berkualitas. Yang mencuat kepermukaan justru inkonsistensi itu tampak dalam berbagai kasus yang belum diselesaikan dengan baik atau konflik-konflik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kebijakan serta pelanggaran HAM yang jelas-jelas mereduksi eksistensi rakyat sebagai manusia.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa warisan politik Orba masih memasuki sekaligus mempengaruhi kiprah politik para pemimpin era reformasi. Suatu sistem yang memperkuat kultur politik yang didominasi atau dikendalikan oleh kekuasaan para penguasa. Mereka memutlakan kepentingan subjektif dalam pengambilan kebijakan-kebijakan publik. Pemutlakan ini menciptakan kekuasaan sebagai mesin pembunuh (*the killing machine*), membuat tuntutan objektif masyarakat tereliminasi dan juga roda politik berputar seturut selera atau mekanisme yang diformat secara subjektif. Karena penguasa sangat egois dan cenderung represif maka dengan sendirinya dialog akan mati, partisipasi masyarakat macet, sikap kritis sulit tumbuh, kecerdasan masyarakat tertatih-tatih, keadilan sulit diraih, keadilan

hukum hanya sandiwara, karena semuanya kembali kepada selera para penguasa (Regus, 2004:77-79). Tabiat subjektivisme politik kekuasaan oleh yang berkuasa menjadikan demokrasi kita tidak berputar di atas rodanya.

Kekerasan Sebagai Fenomena yang Meluas

Kalau kita mencermati dengan teliti situasi bangsa kita, entah itu lewat pengalaman praksis kita sendiri atau melalui media informasi, maka kekerasan merupakan hal yang aktual dan mondial dalam konstelasi sosial dan politik bangsa kita. Kekerasan telah menjadi hantu yang mengusik harmoni dalam kehidupan bersama. Ia tidak mengenal musim. Ia ada di udara, ada di benak manusia dan nubari kebudayaan kita. Ia telah meracuni konstelasi politik. Kekerasan mejadi bagian dari media politik untuk merepresi dan menyingkirkan keberanian-keberanian “anti dominasi” kekuasaan. Bahkan bobot dari kekerasan dari hari ke hari semakin besar, mencemaskan dan menghusung kita begitu rapat (Regus, 2003: 107).

Menurut Hanah Arendt, sebagaimana dikutip oleh Mansour Fakkih, kekerasan juga muncul karena tabiat institusi. Institusi dijadikan alat untuk menghancurkan hak-hak rakyat. Pelaku kekerasan selalu dikaitkan dengan budaya institusional. Yang tidak demokratis dan cenderung otoriter (Fakkih, 2003:96). Lebih lanjut Arendt mengamati bahwa perilaku kekerasan biasanya didapati pada seseorang yang hanya patuh secara membabi buta, miskin inisiatif dan tidak memiliki imajinasi. Moralitas pragmatismenya dipakai untuk mempertahankan atau membenarkan cara kekerasan yang dilakukan. Yang ada dalam benak hanyalah mentolerir tirani, intimidasi, dan teror fisik untuk mengabsolutkan intensi dan ambisi pribadi atau kelompoknya (Fakkih, 2003: 96). Dalam hal ini tindakan kekerasan memiliki tendensi politik.

Persoalan semakin problematis tatkala kekerasan harus diselesaikan dengan kekerasan yang dapat melahirkan kekerasan baru. Muncul kontinuitas kekerasan, dalam bahasa Dom Helder Camara, lahirlah spiral kekerasan (*the spiral of violence*). Spiral kekerasan yang menjadi-jadi kemudian menjadikan hak-hak asasi diminimalisasi dan kehidupan kita terbungkus dalam kegelisahan. Dalam konteks ini muncul persepsi negatif atau kebencian yang sangat radikal terhadap eksistensi orang lain. J.P. Sartre mengungkapkannya dengan diktum “orang lain adalah neraka” (*the other people*

is hell) (Muzairi, 2002:175). Atau seturut diktum Hobbesian “manusia adalah serigala bagi manusia lain” (*homo homini lupus*).

Johan Galtung membedah secara intensif realitas kekerasan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Menurutnya kekerasan terjadi karena manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya (Windhu, 1992:64). Tingkat realisasi potensial adalah apa yang mungkin direalisasikan sesuai dengan tingkat wawasan, sumber daya dan hasil kemajuan yang sudah dicapai pada jamannya. Ketika elemen-elemen itu disalahgunakan atau dimonopoli oleh segelintir orang, maka di sana terjadi tindak kekerasan. Hal ini mengakibatkan massa rakyat berada di bawah realisasi potensialnya (Windhu, 1992:64).

Integrasi yang dibayangi Disintegrasi

Munculnya berbagai gerakan disintegratif dari komunitas-komunitas lokal tidak terlepas dari akumulasi kekecewaan atas persoalan mereka yang sudah menggunung namun tidak diselesaikan dengan tuntas. Disintegrasi sosial-politik dilihat sebagai hilangnya rasa memiliki (*sense of belonging*), hilangnya ikatan atau solidaritas komunal hingga hilangnya ketaatan pada sistem dan norma yang berlaku (Abdullah dalam Leksono (ed.), 2000:45). Ketika unsur normatif-komunal teralienasi dari suatu pola interaksi, maka yang muncul adalah obsesi untuk memisahkan diri dari suatu keterikatan yang sudah mapan. Upaya pemisahan diri seperti itu bisa saja menimbulkan konflik. Sebut saja, Papua yang menuntut kemerdekaan, serta munculnya konflik horizontal yang bernuansa SARA.

Secara tentatif, ada sebab-sebab atau pola disintegrasi (Abdullah dalam Leksono (ed.), 2000: 46-47): *Pertama*, situasi sosial dan politik yang menampilkan berbagai bentuk penyimpangan yang telah mengganggu kepentingan umum. Berbagai bentuk kejahatan dengan *modus operandi* yang beragam terjadi berkembang secara meluas pula. *Kedua*, disorganisasi yang ditandai rendahnya ketaatan publik terhadap peraturan dan terhadap sesuatu yang bernilai komunal. Masyarakat cenderung melegalkan sistem hukumnya sendiri tanpa memperhatikan hukum-hukum yang berlaku secara umum. Yang terjadi adalah adanya tendensi atau kesigapan seketika untuk saling memangsa satu sama lain. Politik juga semakin melorot signifikansinya. *Ketiga*, disfungsi sosial dimana institusi-

institusi sosial tidak berfungsi semestinya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat adalah merupakan suatu ekspresi ketidakpuasaan terhadap institusi-institusi yang ada. Memang sangatlah ironis karena institusi-institusi yang sebenarnya menjadi elemen rakyat bersandar justru menjadi sarang yang memelihara kebobrokan.

Munculnya disintegrasi yang dialami selama ini menjadikan kita skeptis untuk mempresentasikan secara meyakinkan konsep Indonesia yang betul-betul bersatu. Hal itu hanya menjadi sebuah kamufase atau kebohongan besar terhadap publik yang hanya menantikan fajar persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa.

SIGNIFIKANSI PERGESERAN PARADIGMA

Kiprah Politik yang Aktif Tanpa Kekerasan

Proses transformasi dalam politik harus terfokus pada usaha untuk membahagiakan manusia. Manusia sebenarnya harus mendapat prioritas sebab politik ada karena ada manusia, baik sebagai pelaku maupun sebagai tujuan. Opsi terhadap kemanusiaan memacu politisi untuk melakukan tindakan politik. Perlu ada afirmasi bahwa aktivitas politik harus dilandasi bisikan nurani yang berlandas pada harkat dan martabat manusia. Parameter berpolitik ada pada humanitas. Kesadaran ini harus dibangun sebagai suatu sikap hidup suatu sikap mental untuk berkiprah tanpa kekerasan sebenarnya sudah mengimplementasikan hakikat dari politik itu sendiri, yaitu penghargaan terhadap manusia sebagai manusia.

Ketika kita menyentil diskursus seputar penghargaan terhadap manusia, maka termaktub juga intensi politik untuk mempertahankan kehidupan manusia itu sendiri. Dalam hal ini politik sebenarnya dipercayakan untuk membentuk manusia yang cinta akan kehidupan. Politik memberi ruang kepada manusia untuk berkreasi, berinovasi, dan berani membangun dunia atas dasar cinta.

Kiprah politik tanpa kekerasan akan benar-benar terwujud kalau para politisi memiliki etos dan moralitas politik. Sebab politik tanpa moral tidak akan sanggup menunjukkan penghargaan terhadap martabat dan hak asasi manusia politik yang tidak berperikemanusiaan atau yang tidak secara eksplisit menghargai rakyat sebagai *person* yang bermartabat luhur, akan mendorong terjadinya tindakan kekerasan, diskriminasi, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi rakyat sebagai objek belaka (Ohoitmur dalam Sinaga, dkk. (eds.), 2004:214). Bahkan etika politik menuntut setiap institusi sosial politik untuk

menciptakan keadilan struktural atau keadilan prosedural yaitu prosedur atau mekanisme yang secara legal ditetapkan sebagai instrumen bagi distribusi hak-hak dan kewajiban dasar bagi seluruh rakyat (Ohoitumur dalam Sinaga, dkk. (eds.), 2004:218). Aktualisasi politik yang berpijak pada nilai etis memungkinkan terjadinya harmoni satu dengan yang lain, bukanya menindas sesama dalam nuansa kekerasan.

Etika politik perlu konsisten terhadap orientasi publik ketimbang orientasi yang egosentris. Hal itu mirip dengan apa yang telah dikonseptualisasikan oleh Hannah Arendt bahwa keterlibatan seseorang dalam tindakan politik tidak untuk pertama-tama mempromosikan kesejahteraannya, tetapi untuk merealisasikan prinsip-prinsip intrinsik bagi kehidupan politik seperti kebebasan, kebersamaan, keadilan, dan solidaritas (d'Entreves, 2003:31).

Memang perlu disadari pula bahwa represi politik yang diboncengi oleh kekerasan telah mengakibatkan disposisi kita terpetakan pada suatu titik ketakberdayaan untuk membangun kohesi sosial yang kondusif dimasa kini dan masa depan. Pengalaman itu kiranya memotivasi kita untuk tidak lagi menjadikan represi kekerasan sebagai identitas kebangsaan kita. Perlu ada pergeseran paradigma politik dan persepsi yang lebih bernilai konstruktif dan humanistik.

Kiprah Politik yang Aktif Mendengarkan dan Melayani Rakyat

Titik kulminasi dari proses demokratisasi adalah kesejahteraan dan kedaulatan rakyat. Rakyat diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik dan menghidupkan kembali budaya kontrol publik yang konstruktif. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah optimalisasi produktivitas sistem politik terutama dalam mengambil keputusan-keputusan yang urgen.

Kriteria produktivitas sistem politik adalah kesejahteraan hak politik para warga kemungkinan partisipasi politik, tuntutan kewajiban bagi para penyelenggara kekuasaan untuk mempertanggungjawabkan implementasi kekuasaan yang telah dimandatkan kepadanya, transparansi dan kalkulasi politik, derajat legitimasi tatanan politik, pembendungan privilese kelompok tertentu, keadilan prosedural dan juga kepastian hukum serta kebebasan para warga (Kleden, 2003:14). Lebih memperhatikan tuntutan-tuntutan dan aspirasi sosial masyarakat yang mendesak, daripada kepentingan sektarian juga merupakan

suatu bentuk aktivitas politik yang produktif. Konsekuensi logisnya adalah kita tak perlu mentolerir atau mengamini aktivitas aktor-aktor politik (elite dan masa) yang melakukan minimalisasi politik, apalagi melegitimasi kekerasan untuk memperoleh kekuasaan. Kebijaksanaan yang salah atau penyalagunaan otoritas perlu dipersoalkan oleh masyarakat. Dalam hal ini hak rakyat patut mendapat perhatian yang adekuat. Agar kedaulatan itu terwujud maksimal, rakyat perlu memiliki ruang gerak yang cukup leluasa. Namun ruang gerak itu hanya bisa tampak signifikan jika rakyat selalu berjuang semaksimal mungkin untuk menyampaikan kebenarannya.

Kontinuitas Kritik Liberatif Atas Krisis Multidimensi

Krisis yang bercorak multidimensional sedang menggerogoti suasana kebangsaan kita. Banyak sinyal yang bertaburan bahwa atmosfer yang ada bukanlah atmosfer yang kita kehendaki secara kolektif. Aktus politik yang diimplementasikan bukanlah aktus yang semula kita cita-citakan. Sementara tanggung jawab pemerintah dan partisipasi aktif rakyat belum dikordinasi dalam suatu ikatan yang valid. Malah yang terjadi adalah ketidakstabilan dalam menjalankan proses demokratisasi. Untuk mengatasi krisis tersebut diperlukan upaya yang elegan dan konstruktif. Dalam hal ini kita perlu memberikan suatu manajemen kritik yang bersifat liberatif (membebaskan).

Kritik mengekspresikan ketidakpuasan yang telah lama mengekang kita. Aktivitas kritik atas krisis memiliki intensi agar situasi yang diliputi kegelisahan (seperti saat ini) dapat dipulihkan kembali. Kekerasan bukan lagi jalan yang valid untuk menyelesaikan persoalan, KKN bukanlah jalan yang konstruktif untuk mengusung kesejahteraan bersama, dan pembungkaman yang tidak manusiawi bukanlah suatu tindakan yang bermartabat bagi seorang manusia. Pokoknya, semua hal perlu ditilik kemudian dikultivasi secara kritis sebagai tindakan makar, intimidasi atau provokasi yang sangat berbahaya. Sikap kritik konstruktif yang menjelma tidak layak dicap immoral.

Kritik dan krisis saling bertautan sebab kritik adalah diagnosis krisis yang memperlihatkan bagaimana distorsi kenyataan faktual dapat diarahkan kepada kenyataan normatifnya (Hardiman, 2003: 106). Kemampuan untuk mengenal krisis itu sudah merupakan langkah penting untuk membebaskan diri darinya. Jadi pengetahuan akan krisis membawa

imperatif untuk mengubah perilaku dan penghayatan agar krisis dapat ditanggulangi sebelum berkembang menjadi sebuah malapetaka dalam segala kepenuhan sifat objektifnya, dihadapan mekanisme hegemoni, konsep-konsep kritis yang deliberatif mutlak diperlukan demi membangun kesadaran transformatif.

Kesadaran transformatif menghantar semua pihak untuk memperhatikan kembali tanggung jawab personalnya. Oleh karena itu, semestinya kita tidak boleh diam (bungkam) tatkala situasi kita dicabik-cabik oleh kekuasaan yang hegemonik dan superioristis. Kontribusi kritik yang liberatif semestinya dapat melahirkan perubahan yang elegan dan menyodorkan momentum yang *favourable* bagi kehidupan masyarakat luas. Dan tugas kita selanjutnya adalah bagaimana perubahan itu dapat membawa sesuatu yang bermakna. Kesadaran akan adanya perubahan dapat memotivasi setiap insan untuk mengkultivasi tindakannya dan menghidupkan kembali daya profesionalitasnya.

KESADARAN KRITIS DAN PROFETISME KAUM INTELEKTUAL

Signifikansi Kesadaran Kritis Bagi Rakyat

Indonesia yang demokratis akan terwujud kalau masing-masing pihak sadar akan keberadaannya. Rakyat yang sebagai empunya kedaulatan harus sadar bahwa situasi kita sedang terbelenggu dan terpasung oleh kebijakan yang tidak adil. Rakyat perlu tahu secara holistik intensionalitas subjektif setiap kebijakan yang dijustifikasi. Dengan kata lain, rakyat tidak lagi mendekam dalam tempurung bisu yang hanya mengandalkan pasivitas atau menunggu rentetan opresi atau penindasan yang dilakukan penguasa. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan akhir-akhir ini lebih kepada suatu akselerasi untuk menghancurkan demokrasi. Dengan menyadari situasi aktualnya, rakyat dapat memberikan kritik yang konstruktif terhadap pemerintah. Rakyat juga bisa melegitimasi cara-cara lain yang lebih elegan untuk mewujudkan suatu perubahan.

Kesadaran Kritis: Ikhtiar Merenovasi Pola Situasi

Di tengah kerapuhan dan kegamangan situasi bangsa, kesadaran kritis merupakan hal yang sangat urgen. Dikatakan urgen karena kesadaran itu sangat menentukan format dan konstruksi politik saat ini sekaligus menopang kiprah keberadaan masyarakat

di tengah konflik yang terjadi. Kesadaran kritis merupakan filter terhadap setiap kebijakan politik yang diputuskan. Dalam filterisasi kritis itu kebijakan yang irelevan dapat digantikan dengan kebijakan yang dinilai layak untuk kebaikan bersama. Politik bongkar pasang suatu kebijakan tidak didominasi oleh para penguasa tetapi dipertimbangkan menurut aspirasi dan *input* yang diberikan rakyat.

Signifikansi kesadaran kritis juga mengapresiasi suatu keterlepasan dari kebudayaan bisu (*the culture of silence*) (Freire, 1974:24). Kalau sebelumnya rakyat hanya tahu mengadopsi setiap kebijakan, maka sekarang rakyat perlu aktif dan bijak dalam menilai suatu kebijakan. Seseorang yang memiliki kesadaran kritis tidak hanya tahu mengafirmasi atau mengkonservasi secara pasif semua keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi sebaliknya selalu aktif dan partisipatif dalam menjalankan kritik yang kritis. Kritik merupakan suatu segmen yang sangat penting untuk menghasilkan suatu kebijakan yang berguna.

Antikritik adalah ciri penguasa yang fasistik. Antikritik bukanlah cermin penguasa yang dimanmana mengumbar senyum demokrasi, reformasi, dan keterbukaan. Kritik malah akan memperkuat posisi seorang penguasa yang bijak. Penolakan terhadap kritik justru akan memperlemah posisinya (Susetyo, 2006:6). Dalam ranah kritik yang transformatif, yang disoroti bukan hanya tingkah laku penguasa tetapi juga sejauh mana dia menggunakan kekuasaannya. Kritik merupakan salah satu bentuk evaluasi kritis atas eksperimentasi yang sampai saat ini belum sampai pada titik kulminatif.

Kesadaran kritis membantu rakyat untuk menemukan inovasi-inovasi baru. Kesadaran kritis atas situasi politik yang melingkunginya membuat dia tidak teralienasi dari persoalan yang mendera kehidupan komunitasnya dan hal itu justru memampukan dia untuk menciptakan opini secara objektif. Kesadaran selalu terarah kepada objek tertentu yang kemudian menghantar rasionalitas untuk menilainya.

Kesadaran kritis akan mendapat signifikansinya kalau ada kesediaan untuk mendengarkan yang lain. Itu berarti setiap kebijakan yang dibuat tidak hanya berdasarkan otoritas dari atas, tetapi berpijak pada apa yang dikehendaki rakyat. Sering para penguasa membuat keputusan yang tidak memperhitungkan kondisi dan realitas yang mendera masyarakat. Ketika keputusan itu tidak valid, maka nilai-nilai yang ingin diraih pun tidak dapat tercapai. Menghargai suara rakyat merupakan suatu paradigma yang

semestinya diterima oleh para tokoh (pemimpin) di negara kita. Paradigma lama yang mengaksentuasi monologika harus diganti dengan paradigma dialogika yang menekankan transmisi atau eksistensi kebijakan dalam terang relasi subjek dengan subjek. Dialog tidak berarti menerima begitu saja apa yang didialogkan tetapi berikhtiar untuk mengerti dan memahami serta menilai secara kritis-objektif.

Memaknai Kebebasan Berbasis Responsibilitas dan Intelegibilitas

Kebebasan dilihat sebagai suatu kebutuhan (*necessity*) karena hanya dengan individu-individu yang bebas proses demokrasi (demokratisasi) menjadi mungkin. Kita hanya boleh mengangkat wacana demokrasi kalau para warga menyadari diri sebagai manusia yang bebas dan dapat menentukan sikap terhadap kehidupan bersama (Kleden, 2003:104-105). Namun kebebasan itu perlu didasarkan pada sikap tanggungjawab yang dijamin intelegibilitasnya. Kebebasan seperti ini memungkinkan rakyat untuk bersikap profetis. Suara profetis merupakan pelita pembaruan bagi kiprah berpolitik kita, baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Namun kebebasan akan mengalami kontradiksi kalau kebebasan itu digunakan untuk menghancurkan bangsa atau melegitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, rakyat perlu kritis dalam menilai kebebasannya. Setiap kebebasan selalu diakomodir oleh hukum. Rakyat perlu mengkondisikan diri dengan hukum yang berlaku sehingga dapat memaknai kebebasannya.

Rakyat yang bebas harus menggunakan kebebasannya dengan penuh tanggungjawab dan memiliki intensionalitas sosial. Rakyat adalah kumpulan individu yang ada dan berada secara eksistensial. Masyarakat dan komunitasnya tidak akan mengalami transformasi dan gerak maju, kalau setiap pribadi menjadi bagiannya tidak terlibat secara aktif. Pribadi yang terlibat secara produktif, responsif dan berinisiatif dalam kehidupan komunal. Perubahan kesadaran kognitif akan berlangsung terus pada taraf kesadaran pragmatik dengan aktif memprehensi realitas konkret. Namun untuk, mengubah kesadaran seluruh masyarakat dibutuhkan suatu sikap saling memahami dan menerima satu sama lain.

Integrasi yang adekuat tidak terbatas pada hubungan horisontal tetapi juga hubungan vertikal, dengan instansi-instansi pemerintah. Relasi antara keduanya adalah relasi yang bersifat dialektis. Artinya, pola interaksi dalam semua sektor sosial dicitrai

dengan pola hubungan dialektis yang membebaskan dan saling membebaskan. Rakyat senantiasa berusaha membebaskan diri dari belenggu rantai opresi dan menuntut adanya kesediaan penguasa untuk mendengar getiran, erangan mereka meski di sadari pula bahwa watak menghisap dan menindas rakyat selalu hadir dalam semua segmen kekuasaan yang tersedia (Rengka, 2004:11,15). Para penguasa harus menyadari hal itu dan bertindak dengan penuh kesadaran bahwa selalu ada yang memperhatikan. Perhatian ini memungkinkan mereka untuk melakukan sinkronisasi aspirasi dengan kebijakan politik. Oleh karena itu pemerintah, tidak boleh bekerja secara otonom tetapi hendaknya membangun kerja sama yang bersifat impersonal (Hidayat, 2006:7). Semakin giat melakukan sinkronisasi aspirasi yang konstruktif pula kebijakan yang dihasilkan.

Partai-partai politik tidak dapat, sesudah pemilihan umum selesai, membebaskan diri dari perhatian terhadap rakyat yang dengan antusias mengusung kehebatan mereka. Begitu juga halnya dengan mereka yang duduk dikursi legislatif. Tidak ada yang tidak boleh dikontrol oleh masyarakat. Kalau paradigma lama selalu mengintensifkan akting semu (*sandiwara*) maka paradigma baru mengharapkan suatu ekspresivitas kepemimpinan yang transparan dan realistis. Transparansi dan sikap realistis mengafirmasi kerendahan hati pemimpin atas kelebihan dan keterbatasannya.

Rakyat selalu berjuang semaksimal mungkin untuk bebas mengungkapkan kebenarannya. Mereka memiliki kebenaran dan kebenaran itu lahir dari sesuatu yang benar-benar terjadi. Rakyat akan merasa terluka atau terkucilkan takkala kebenaran mereka dinilai tidak memiliki fundasi dan tidak memiliki legitimasi hukum. Bahkan apa yang mereka perjuangkan dilihat sebagai tindakan kriminal. Oleh karena itu, kiprah politik juga harus mempercayai rakyat dan mengkultivasi dendang kebenaran mereka.

Hal itu sedikit berbeda dengan kebenaran versi penguasa. Kebenaran mereka adalah kebenaran dari sudut pandang yang sempit. Karena itulah, kebenaran tersebut harus mendapatkan masukan dari kebenaran lain, dari sudut pandang wakil rakyat dan rakyat itu sendiri. Tidak semua kebenaran versi penguasa akan menjadi kebenaran di tingkat rakyat. Yang sering terjadi sebaliknya, kebenaran versi penguasa adalah malapetaka bagi rakyat (Susetyo, 2006:6). Oleh karena itu dibutuhkan suatu sikap kerendahan hati untuk saling percaya satu sama lain.

Sikap saling percaya biasanya akan mempengaruhi *image* atau persepsi mereka selanjutnya. Para penguasa melihat rakyat sebagai bagian integral dari seluruh kiprahnya dan menjadikan yang integral itu sebagai sesuatu yang signifikan, begitu pun sebaliknya.

Mengkonstruksi Komunikasi Yang Komunikatif

Kesadaran kritis selalu terproyeksi kepada fenomena-fenomena eksternal. Keduanya mempunyai korelasi yang tereksplisit dalam komunikasi. Juergen Habermas mengedepankan signifikansi dari komunikasi yang komunikatif dan dialogis tanpa dominasi, serta kritik yang bisa merenovasi situasi (pola pikir) kearah yang lebih baik. Idealisme yang diprimasikan Habermas adalah komunikasi dengan tindakan komunikatif untuk mencapai konsensus dan harmoni dalam hidup bersama.

Komunikasi membuka horison kesadaran kritis manusia untuk berdialog dan mengapresiasi diri tanpa rantai dominasi. Komunikasi adalah praksis substansial yang dapat mengatasi kebuisan dan ketakutan bersuara yang masih tendensius dalam masyarakat. Dalam komunikasi hanya ada tindakan aktif dan responsif untuk berbicara dan mendengarkan apa yang dibicarakan. Setiap format komunikasi, menurut Habermas memiliki intensi untuk meraih konsensus tanpa paksaan. Ikhtiar mencapai konsensus bisa menyata kalau ada paradigma saling menghargai satu sama lain dalam hidup bermasyarakat.

Dalam terang gagasan Habermas, negara kita akan bertahan jika dibangun atas komunikasi timbal balik yang menghargai kebebasan dan kesamaan derajat masing-masing anggota. Penghargaan ini membuka horison berpikir masing-masing anggota untuk selalu terbuka terhadap perspektif lain serta mengoptimalkan upaya negosiasi untuk mencapai konsensus bersama. Dalam konteks ini perlu ada keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang bernilai demi hal lain, yang secara rasional lebih bernilai. Tidak ada praktik hegemoni dalam berkomunikasi. Yang tampak adalah hubungan persaudaraan (*partnership*). Aktivitas pengungkapan perspektif perlu juga dibarengi dengan sikap menerima perspektif dari luar yang bukan perspektifnya. Ketika terjadi benturan perspektif dan tidak ada konsensus, di sana bisa saja muncul kritik yang variatif terhadap realitas. Habermas menegaskan bahwa kritik muncul kalau konsensus tidak tercapai.

Kritik merupakan segmen yang sangat signifikan dalam membangun komunikasi yang komunikatif. Kritik bernilai sosial dan mengandung dan emansipatoris karena berusaha membongkar ideologi-ideologi tertentu yang menegasikan manusia individual di dalam masyarakat. Habermas melihat bahwa kerangka kritik yang argumentatif perlu mengarah kepada klaim kesahihan. Klaim-klaim itu adalah klaim kebenaran (*truth*), klaim ketepatan (*rightness*), klaim autentisitas atau kejujuran (*sincerety*) dan klaim komprehensibilitas (*comprehensibility*) (Hardiman, 1993:xxii). Orang yang berhasil mencapai klaim-klaim ini disebutnya memiliki kompetensi komunikatif.

Menyadarkan Rakyat Sebagai Opsi Fundamental Kaum Intelektual

Kaum intelektual selalu menempatkan dirinya sebagai golongan kritis yang militan dalam membela dan memperjuangkan kebenaran, dengan adanya soliditas kerja sama yang adekuat. Profetisme kaum intelektual lahir dari suatu kegelisahan atas kehidupan bangsa yang morat-marit. Namun kesadaran kritisnya tidak hanya terfokus pada suatu kegelisahan tetapi bagaimana kesadaran itu menyadarkan orang untuk membangun bangsanya. Kesadaran kritis kaum intelektual harus dieksplisitkan dalam praksis. Inklusivitas suatu intelektualitas menolong dan menyadarkan rakyat untuk selalu sadar dan bersikap kritis. Kiprah kaum intelektual dalam proses konsientisasi kritis kepada rakyat dilihat sangat bermakna karena menentukan eksistensi rakyat di kemudian hari. Secara implisit juga ada ikhtiar untuk merekonstruksi situasi bangsa yang sedang terpuruk. Rakyat kita sedang terkungkung dalam keterpurukan dan kegelisahan. Oleh karena itu, kaum intelektual perlu berpartisipasi secara transformatif di dalamnya.

Partisipasi Transformatif

Reformasi tidak hanya membutuhkan perubahan dalam tingkat normatif dan struktural tetapi juga bagaimana memodifikasi konsep-konsep kritis yang dapat mencerahkan publik atau bagaimana mencapai intelektualitas berkualitas dari anak bangsa (mahasiswa/i). Pikiran-pikiran kritis, inovatif dan konstruktif perlu mendapat tempat yang layak. Dalam hal ini, kapasitas kaum intelektual sebagai agen pembaruan diuji sekaligus teruji dalam praksis. Konteks saat ini menuntut bahwa masyarakat tidak

hanya membutuhkan aktor-aktor politik yang menyandang jabatan spektakuler tetapi juga membutuhkan para pemikir (kaum intelektual) -yang terlibat aktif- untuk mencapai pencerahan (iluminasi) dalam hal berpolitik.

Aneka tragedi yang telah dipaparkan, tentu sudah sekian lama menyentil bahkan menghantui pikiran kita. Kita sebagai insan-insan intelektual perlu merasa bertanggungjawab sekaligus terpanggil untuk memberikan kontribusi dan solusi yang akomodatif terhadap kiprah reformasi politik. Yang ditekankan di sini adalah usaha-usaha praktis untuk mewujudkan intensi yang sangat fundamental dari kiprah politik itu sendiri, yakni membahagiakan manusia. Manusia haruslah menjadi prioritas dan opsi fundamental dari seluruh kehidupan berpolitik sekaligus menjadikan manusia sebagai subjek yang harus dijunjung tinggi.

Kaum intelektual dituntut untuk mengedepankan tanggung jawab intelektualnya. Itu berarti perlu ada kontribusi terhadap perkembangan politik. Dalam hal ini kaum intelektual bisa menggunakan kapasitas intelektual untuk melakukan kritik, memberikan pikiran-pikiran kreatif-konstruktif, reformatif dan demokratis, inovatif dan berdaya guna. Bisa juga melalui organisasi-organisasi atau perhimpunan yang didirikan oleh para mahasiswa itu sendiri. Partisipasi intelektualitas kritis tentu tidak terlepas dari tanggung jawab dan kegelisahan atas apa yang sedang terjadi dalam kenyataan. Konteks dan intelektualitas merupakan dua komponen yang saling bertautan, tidak bisa dipisahkan, dan memiliki tendensi dialektis.

Konteks yang dimaksudkan di sini adalah situasi publik (masyarakat) yang juga cukup akrab dengan realitas pergulatan politik praktis. Ketika partisipasi terealisasi dalam konteks publik, di situlah kapasitas intelektual mendapat signifikansinya. Untuk itu, areal peran yang semakin terbuka dan diakui dalam pemerintahan reformasi ini meminta dari kaum intelektual kesungguhan hati untuk melakukan hal-hal yang transformatif. Tanpa adanya kesungguhan, intelektualitas hanya menjadi hamba dari ketidakadilan dan kebobrokan. Oleh karena itu, kaum intelektual pun harus objektif dan siap menerima segala kritik yang ditujukan kepadanya kalau mereka tidak menjalankan demokrasi. Memang patut disayangkan kalau ada kaum intelektual yang menjual intelektualitasnya hanya untuk popularitas, privilese, dan uang.

Partisipasi dan transformatif dari intelektualitas kritis tidak berarti mengabsolutkan yang satu lalu merelativisir yang lain. Kontribusi dalam dunia intelektual-teoretis dan arah praksis harus diimplementasikan. Keduanya bisa saling menyokong satu sama lain sehingga kaum intelektual yang berpartisipasi adalah mereka yang tidak hanya tahu berpikir kritis tetapi juga tahu bagaimana harus bertindak dengan tepat.

Golongan Elite yang Harus Menjadi Golongan Populis-Kritis

Peran kaum intelektual sangat dibutuhkan tatkala menyaksikan aras politik yang kabur. Kaum intelektual perlu berani meninggalkan tembok-tembok intelektualisme untuk mengambil bagian dalam persoalan rakyat (golongan populis-kritis) (Limahekin, 2000:113). Kaum intelektual harus berani bertindak kritis—profetis di tengah aktus-aktus apolitis yang cukup represif dan indifferen. Orang yang berpikir kritis harus sensitif melihat persoalan, berani menyingkirkan interese ideologis yang palsu, membantu menciptakan stabilitas, prihatin terhadap tendensi-tendensi ke arah irasionalitas, mampu mempertanggung-jawabkan segala sesuatu secara rasional yang dapat dijamin intelegibilitasnya, dan mampu mempertahankan vitalitas intelektual serta integritas moralnya ke dalam realitas. Dengan kata lain, identitas seekor anjing yang selalu menggonggong dapat menjadi identitas kaum intelektual dalam menyikapi berbagai persoalan ketidakadilan dalam masyarakat.

Rakyatlah yang harus diperjuangkan haknya. Sesuatu yang kita perjuangkan adalah cetusan hati nurani rakyat yang mengharuskan kita untuk merakyat serta memotivasi mereka untuk eksis dan mendapat posisi yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka tidak lagi menjadi pihak yang selalu dipinggirkan dalam dataran rendah proses politik, hanya karena posisinya yang kurang strategis dari aspek politik. Ruang gerak mereka harus lebih bebas dan tidak lagi terlalu bergantung kepada pemerintah. Kesadaran ini dapat menghantar mereka untuk menilai, mengkritisi serta membuat komparansi secara objektif setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Berada bersama rakyat merupakan suatu respons yang baik sekaligus memenuhi panggilan untuk memperbaiki keadaan yang buruk. Panggilan ini didasarkan pada tugas hakiki dari kaum intelektual

untuk mencari kebijaksanaan sejati. Usaha pencarian ini perlu karena kaum intelektual menyebut jati diri kelompoknya sebagai pencinta kebijaksanaan (Neno, 2000:91).

Kebijaksanaan yang dicari kaum intelektual memiliki substansi pengenalan akan diri sendiri. Inti sari kebijaksanaan sekaligus merupakan kebenaran yang membebaskan manusia sehingga manusia dapat hidup secara lebih manusiawi. Agar kebebasan ini dapat dirasakan dan dinikmati oleh semua orang secara merata, dituntut oleh hakikat diri dan tugasnya untuk mengabdikan, membela, dan menegakkan kebenaran (Neno, 2000:91). Tanpa kebenaran tidak ada keadilan. Tanpa keadilan tidak ada kedamaian, dan ketika kedamaian nihil maka situasi anarkis atau *chaos* menjadi dominan.

Aktif dan Militan dalam Melakukan Proses Konsientisasi Politik

Salah satu fungsi pokok dari kaum intelektual adalah ikut mengambil bagian dalam proses konsientisasi politik terhadap masyarakat terutama menyangkut eksistensi mereka. sebagai subjek dalam politik rakyat memiliki hak-hak politik yang sama seperti yang lain. Ketika kesadaran kerakyatan semakin kuat maka dominasi politik negara terhadap rakyat semakin lemah dan berkurang. Penulis berpikir bahwa banyak intelektual bersama rakyat (termasuk LSM) dan pemerintah, dan bukan hasil konspirasi politik yang sepihak.

Kekuasaan tidak boleh bertindak alienatif terhadap potensi-potensi intelektual rakyat yang barangkali sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka harus diberi kesempatan untuk menggunakan daya rasionalnya atau kapasitas intelektualnya sebagai salah satu wujud sumbangan mereka terhadap kehidupan bangsa ini.

Dewasa ini kita melihat adanya kecenderungan sebagian rakyat yang ingin mengetahui apa yang tersembunyi dalam sebuah kebijakan. Rakyat ingin tahu agenda-agenda tersembunyi penguasa dalam berbagai kebijakan. Kenyataan ini sangat menggembarakan karena rakyat akan mulai paham akan kewajiban dan hak-haknya (Susetyo, 2006:6). Di sini ada loncatan paradigmatis dalam kehidupan sosial yakni dari masyarakat yang pasif, diam dan selalu bungkam atau dibungkamkan ke masyarakat produktif, partisipatif, dan cukup kuat mempengaruhi para pembuat keputusan politik. Rakyat yang produktif selalu menyadari bahwa mereka selalu berada dalam situasi dan perlu menanggapi situasi itu secara

aktif dengan menghidupkan kembali tradisi berpikir kritis, responsif, berani menolak kesadaran represif yang berdiam di dalamnya, dapat menemukan bahasanya sendiri dan total membela kesejahteraan bersama. Oleh karena itu rakyat perlu tahu tentang manajemen kritik yang baik dan memiliki nilai yang membangun. Namun rakyat juga harus berani mengkritik kaum intelektual yang membelot kepada penguasa.

Menggalang Kerja Sama dan Solidaritas

Intensionalitas perjuangan reformasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu kaum intelektual, pemerintah dan rakyat perlu saling membantu terutama dalam menentukan akses politik yang benar, sistem pemerintahan yang demokratis dan memprioritaskan kesejahteraan bersama sambil tetap berpegang pada sikap kritis-objektif. Urgensi kerja sama terletak pada konsistensi untuk melakukan evaluasi kritis dan perumusan kembali pelbagai ide untuk masyarakat yang bertanggungjawab dan sedang berjuang melawan individualisme yang tersembunyi, kiprah para politisi busuk yang vandalistis dan indiferektisme negara terhadap kesejahteraan rakyat.

Situasi memang sangat membutuhkan kerja sama sekaligus membangun tekad (komitmen) bersama mengatasi krisis multidimensi, kendatipun masih bersifat sporadis, hanya dalam kesamaan tekad, transparansi dan komitmen yang adekuat, kita mampu mewujudkan atmosfer politik yang konstruktif dan berkualitas. Dalam ranah kerja sama itu, kita bisa mempertimbangkan secara matang orientasi politik ke depan, kebijakan politik yang memiliki preferensi publik, bagaimana mengintegrasikan persepsi yang pluralistis serta apa yang perlu dibuat demi terwujudnya idealisme reformasi dan berhasilnya proses demokratisasi.

KESIMPULAN

Kiprah politik selalu dilihat dalam sudut pandang dua kutub (bipolar) yang kontradiktoris. *Pertama*, politik dilihat sebagai instrument yang paling jitu untuk memperoleh harta atau jabatan. Politik diminisialisasikan dengan berbagai aktus kekerasan dan mekanisme hegemoni. Muncul aneka persepsi bahwa politik kotor, politik itu ironis, dan politik itu ladang potensial untuk memeras orang lain. *kedua*, politik adalah suatu bidang yang mengikhtikarkan kesejahteraan bersama. Politik adalah suatu seni pengabdian yang berusaha mengantar manusia ke tingkat yang

lebih baik. Oleh karena itu diharapkan para aktor politik dapat tampil dalam citra militan dan menyodorkan momentum yang favourable bagi kehidupan masyarakat luas.

Bila orientasi politik di Indonesia adalah kesejahteraan bersama dan integritas nasional, maka transformasi paradigmatis dan nilai politik perlu diberi ruang yang cukup. Transformasi ini kiranya menjadikan politik kita tetap berjalan pada arahnya. Kemudian transformasi paradigmatis ini akan betul-betul nyata kalau adanya kerja sama dan dialog yang komprehensif antara berbagai pihak atau instansi yang ada dalam negara kita ini. Kita harapkan saja, dihari-hari mendatang demokrasi betul-betul dijunjung tinggi, pikiran-pikiran kritis tetap dihargai, politik menjadi area yang dapat melahirkan kedamaian, dan kesejahteraan serta adanya kiprah politik tanpa diboncengi oleh kekerasan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, I. 2000. "Kondisi Sosial yang Dibayangi Disintegrasi Tanpa Ujung", dalam Ninok Leksono (ed). *Indonesia Abad XXI*. Jakarta: Kompas.
- D'entreves, M.P. 2003. *Filsafat Politik Hannah Arendt* (terj.). Yogyakarta: Qalam.
- Fakih, M., dkk. 2003. *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun Gerakan HAM*. Yogyakarta: Insist Press.
- Freire, P. 1974. *Education For Critical Consciousness*. London: Sheed and Ward.
- Hardiman, F.B. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, F.B. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hidayat, K. 4 Februari, 2006. "Merindukan Pribadi-Pribadi Unggul", dalam: *HU Kompas*.
- Kleden, P.B. Thn II, No. 2, 2003. "Kenapa Demokrasi?", dalam *Jurnal Ledalero*.
- Kleden, P.B. Thn II, No. 2, 2003. "Kebebasan, Demokrasi, dan Allah", dalam: *Jurnal Ledalero*.
- Limahekin, B. Seri 44/1:2/2000. "Kekuatan Idealisme dalam Gerakan Mahasiswa", dalam: *VOX*.
- Muzairi, H. 2002. *Eksistensialisme Jean Paul Sartre*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Neno, L.Y. Seri 44/1:2/2000. "Mahasiswa dan Indonesia Baru", dalam *VOX*.
- Ohoitmur, Y. 2004. "Pelaksanaan Otonomi Daerah: Berpeganglah Pada Etika Politik", dalam Anicetus B. Sinaga, dkk. (eds). *Etos dan Moralitas Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Piliang, Y.A. 31 Maret 2004. "Minimalisme Politik", dalam *HU Kompas*.
- Regus, M. 2004. *Sketsa Nurani Anak Bangsa*. Jakarta: Obor.
- Regus, M. 2003. *Republik Sialan*. Maumere: Ledalero.
- Rengka, P. "Menuju Demokrasi Deliberatif" dalam Pos Kupang.
- Susetyo, B. 7 Mei 2004. "Melawan Kebenaran Versi Penguasa" dalam *Kompas*, 10 Februari 2006.
- Windhu, I.M. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.